



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

HARI : Senin

TANGGAL : 27 APRIL 2023

PUKUL : 11.00 WIB

**AGENDA : PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
MALANG TAHUN 2022.**

A. PIMPINAN RAPAT



Nama : DARMADI, S.Sos
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



Nama : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	SODIKUL AMIN	Plt.Ketua	NASDEM
3	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
4	MISKAT , SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN , S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN , S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	MUHAMMAD UKHROWI, S.Sos.	Anggota	PKB
17	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
18	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
19	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
20	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
21	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
22	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
23	SUSIYONO	Anggota	PKB
24	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
25	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
26	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S.Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA

44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA
45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
46	YAZID SALIM, S.E.	Anggota	GERINDRA
47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFİQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
Jumlah		50 orang	8 PARTAI

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA 34 ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF c, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP **"BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM"** RAPAT

PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, SENIN, TANGGAL 17 APRIL 2023,
SAYA NYATAKAN DIBUKA (TOK!!! 1 X)

YANG TERHORMAT,

SDR. BUPATI MALANG;

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN
PARA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG
BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD, MARILAH KITA
MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT
RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, DI BULAN RAMADHAN INI KITA
MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN, MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA
DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TETAP
TERLIMPAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD S.A.W
BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENERUS PERJUANGANNYA.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI
MENGUCAPKAN TERIMAKASIH "SELAMAT IDUL FITRI 1444 H,
TAQABBALALLAHU MINNA WA MINKUM. TAQABBAL YAA KARIM, MOHON
MAAF ATAS SEGALA KESALAHAN DAN KEKHILAFAN LAHIR DAN BATIN."

SERTA PENGHARGAAN YANG SETINGGI – TINGGINYA KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI MALANG DAN PARA UNDANGAN ATAS KEHADIRANNYA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

SESUAI DENGAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MALANG TANGGAL 27 MARET 2023, AGENDA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI ADALAH : **PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MALANG TAHUN 2022.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DALAM AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019, **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)** DILAKUKAN PEMBAHASAN OLEH DPRD PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH DISAMPAIKAN.

PERLU DIKETAHUI BAHWA REKOMENDASI TELAH DISEPAKATI DAN TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD PADA FORUM RAPAT PARIPURNA YANG PERTAMA. MAKA MARILAH KITA IKUTI BERSAMA **PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2022.**

JURU BICARA DPRD YANG TELAH DITUNJUK, AKAN MEMBACAKAN LAPORAN DPRD ATAS HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2022, BESERTA REKOMENDASI SEBAGAI CATATAN - CATATAN STRATEGIS.

UNTUK ITU KEPADA JURU BICARA DPRD, DIPERSILAHKAN.....

.....Proses Penyampaian Laporan DPRD atas Hasil Pembahasan Pansus LKPJ Bupati Malang Tahun 2022.....



***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian,***

Yang terhormat,

Saudara Bupati Malang

Saudara Wakil Bupati Malang

Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang; atau yang mewakili;

Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta Para Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

Rekan-rekan Pers, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin Yang Saya Hormati,

Mengawali Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022, terlebih

dahulu marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini, kita dapat kembali bertemu dan bertatap muka diforum yang insyaallah penuh barokah ini, dalam keadaan sehat wal'afiat.Aamin.....

Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Hasil Pembahasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022 yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu sesuai Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Malang bersama Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

Rapat Paripurna DPRD Yang Kami Hormati,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022, dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai perundang-undangan, yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Malang adalah, **"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika"**. dengan Misi:

- 1) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul;
- 2) Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
- 3) Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa;
- 4) Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;
- 5) Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan.

Hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 melalui tagline **MALANG MAKMUR** (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2022 merupakan proses evaluasi tahunan atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan tema Pembangunan **"Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan Sumber Daya Manusia dalam rangka percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat;
- 2) Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- 3) Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis;
- 5) Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima;
- 6) Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan hidup, risiko bencana, dan perubahan iklim.

Rapat Paripurna DPRD Yang Kami Hormati,

Dalam memberikan Catatan Strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2022 di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang - undangan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur serta Bidang Kesejahteraan Rakyat, pada hakekatnya adalah merumuskan hasil monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh DPRD selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berangkat dari perspektif dimaksud, kemudian bagaimana merumuskan, melihat, mengamati dan mengukur tentang keberhasilan, disisi lain juga untuk mengidentifikasi problematika-problematikanya.

Sehubungan dengan itu, selain pengawasan yang telah dilakukan dalam rapat kerja dan kunjungan kerja komisi, DPRD juga membentuk Panitia Khusus Pembahas LKPJ Bupati Malang Tahun 2022, untuk membantu mewujudkan fungsi pengawasan, dimana hasilnya merupakan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Malang di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang- undangan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur serta Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Panitia Khusus keempat Bidang tersebut telah melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan dalam forum Rapat Paripurna tadi pagi, oleh karena itu kami sebagai juru bicara DPRD akan menyampaikan beberapa hal, merangkum apa yang telah disampaikan oleh Pansus LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 dimaksud.

Namun sebelum menyampaikan hasil pembahasan DPRD, perkenankan kami memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Malang sepanjang tahun 2022.

Adapun dari hasil pembahasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2022, disampaikan Rekomendasi dalam bentuk "**Catatan Strategis**" sebagai berikut :

BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peranan Inspektorat Daerah sangat penting sebagai pemeriksa pertama, sebelum ada pemeriksaan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diharapkan Inspektorat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dan kepala Desa dalam hal ini masih banyak Desa yang terjadi temuan terkait pengelolaan tanah kas Desa yang selama ini masih banyak permasalahan, dengan melakukan pemeriksaan reguler secara periodik. Adapun kendala di inspektorat yakni ***masih kurangnya Anggaran, kurangnya tenaga pemeriksa dan sosialisasi*** diharapkan Pemerintah Kabupaten Malang ada solusi dan inovasi sistem sehingga ke depan temuan pada Perangkat Daerah Kabupaten Malang dapat diminimalisir dan ***memberikan dukungan (support) untuk 10 WTP berturut-turut;***
2. Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai aparatur pelaksana fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, diharapkan ada ***inovasi program kerja yang lebih baik*** sehingga dalam penegakan hukum di Kabupaten Malang lebih maksimal, utamanya dalam penegakan Peraturan Daerah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara maksimal;
 - ✓ ***Perlunya penambahan anggaran untuk kegiatan satpol PP dalam penegakan Perda bisa lebih efektif,***
 - ✓ ***Penambahan Armada Damkar untuk mendukung Malang barat, agar setiap penanganan bencana bisa maksimal dan efektif.***

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik. Permasalahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun ke tahun sama, perlu ada **formula yang sistematis dan terukur, maksimalkan Tugas dan Fungsi Bank Jatim jika tidak bisa terpenuhi Kerjasama dengan Bank Lain** sehingga target, sasaran dan capaian kinerja bisa tercapai dengan maksimal;
4. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan capaian kinerja yang sudah baik dan Capaian dari sisi anggaran hampir sempurna, untuk rekomendasi yang perlu untuk di perbaiki yaitu:
 - ✓ **Mutasi Jabatan jangan terlalu cepat, sehingga terkesan di paksakan dan tidak profesional.**
 - ✓ **Dibutuhkan akselerasi SDM sehingga butuh anggaran untuk seleksi terbuka dan tugas Belajar.**
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari hasil pengawasan dan monitoring DPRD ke Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Malang, **Masih ada ditemukan permasalahan di Desa**, baik terkait Pelayanan Administrasi, Pengelolaan Keuangan DD/ADD/APBDes, Inventarisasi Tanah Aset Desa dan Kelurahan, hingga Penataan dan Pemberdayaan Kepala Desa beserta Perangkat Desa, agar pelaksanaan pemerintahan desa ke depan menjadi lebih baik, untuk itu DPRD menghimbau Pemerintah Kabupaten Malang lebih meningkatkan peran dalam pendampingan DPMD di Pemerintahan Desa, diharapkan agar tidak ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terkena masalah hukum di kemudian hari.

Dibutuhkan kerja keras dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melakukan pengembangan/Inovasi BUMDes. Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan

taraf ekonomi masyarakat desa. Diharapkan **BUMDes bisa menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa** guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dari hasil pengawasan di beberapa desa di Kabupaten Malang sudah ada BUMDes yang dikelola dengan baik bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat desa setempat. Selanjutnya, DPRD menghimbau Pemerintah Kabupaten Malang agar ada inovasi, dukungan anggaran, percepatan dan kebijakan yang dapat mendorong agar BUMDes di desa-desa di Wilayah Kabupaten Malang bisa saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik;

untuk rekomendasi yaitu:

- ✓ **Membangun infrastruktur jaringan komputer yang kredibel di seluruh desa dan OPD di Kabupaten Malang**
- ✓ **Digitalisasi desa sehingga layanan di desa terpusat menjadi sentra layanan**
- ✓ **Lakukan Survey Kepuasan Masyarakat tingkat Desa (SKM)**

6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan dasar administrasi kependudukan bagi masyarakat, dikarenakan Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pemetaan jumlah penduduk "**Data Bersih**" perlu terus ditingkatkan dan divalidasi, karena sebagai pangkalan data (Database) kependudukan harus terus update. DPRD Kabupaten Malang menghimbau agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik, seperti Program **Desaku Tuntas dan Identitas Penduduk Digital (IKD)** diharapkan bisa segera berjalan di semua Desa di Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi ; **Perlu adanya penguatan jaringan komputer di seluruh Kabupaten Malang untuk melayani masyarakat Kabupaten Malang. Masih diperlukan sosialisasi pelayanan adminduk di desa dan kecamatan.**
7. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang untuk Permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang perlu segera ada upaya penyelesaian oleh Pemerintah Kabupaten Malang secara prioritas, agar permasalahan tersebut tidak semakin berlarut-larut. **Terkait rencana pembangunan Alun-alun Kepanjen hingga**

saat ini masih belum ada progres pembebasan tanah, DPRD menghimbau perlu ada kajian yang komprehensif agar segera ada solusi penyelesaian.

Selanjutnya, DPRD juga mengharapkan terhadap aset tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Malang yang ada segera dilakukan ***inventarisasi secara valid*** dan yang belum bersertifikat segera dilakukan sertifikasi, agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa hukum di kemudian hari;

8. KPU DAN BAWASLU

Menjadi catatan kami terkait permintaan KPU untuk prioritas gudang logistik seluas 4000 m²

Bawaslu mengharapkan hibah gedung BKKBN sebagai sekretariat tetap Bawaslu dan perbaikan peraturan bupati terkait suport PNS yang memadai di Bawaslu.

9. Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat penting dalam membuat peraturan Daerah dan peraturan Bupati sehingga perlu adanya Sosialisasi/Penyuluhan peraturan daerah melalui JDIH untuk lebih digemakan karena masyarakat yang melanggar aturan banyak yang tidak mengetahui Perdanya.

10. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan catatannya untuk memaksimalkan publikasi

11. Bagian Tata Pemerintahan, Perlu adanya wadah komunikasi lintas vertikal dan LKPJ tidak perlu di cetak cukup softfile

12. Bagian Kerjasama, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Malang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (Kabupaten memberikan tanah untuk kedokteran Universitas Brawijaya) sehingga perlu diberikan beasiswa khusus bagi ASN dan Warga Kabupaten Malang.

13. Bagian Organisasi perlu adanya telaah anggaran dinas yang terlalu minim apakah dimerger atau ada penyikapan lain.

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

Bidang Pendapatan:

- Secara Realisasi Pendapatan Kabupaten Malang juga sudah melebihi dari target yang telah ditentukan untuk target awal tahun anggaran 2022 yang tercantum dalam APBD sebesar Rp.4.256.368.816.888,00 (*Empat Triliyun Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan*

Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.4.019.891.694.509.65 (*Empat Triliyun Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Lima Ratus Sembilan Rupiah Enam Puluh Lima Sen*) atau mencapai sebesar 94,44%.

- Namun, realisasi pendapatan yang bersumber dari 3 jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain Pendapatan yang Sah. Ketiga jenis pendapatan tersebut yang perlu dilakukan evaluasi dan telaah kembali yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahwa di Kabupaten Malang pada tahun 2022 ditargetkan Rp.983.028.679.582,57 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Delapan Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen*) dan dapat direalisasikan sebesar Rp762.149.440.858,65 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Miliar Serratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Lima Sen*) atau mencapai 77,53%.

□ Terdapat 3 komponen PAD Kabupaten Malang:

- Pajak daerah yang melampaui target yakni Pajak Penerangan Jalan tercapai 116,17% dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tercapai 116,21% serta Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan Bank Jatim) tercapai 106,67%.
- Retribusi Daerah sangat rendah/belum tercapai (presentase 29,36%) sehingga perlu ada riset khusus tentang pengalihan potensi daerah.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan presentase 50,83% alangkah baiknya bagian realisasi pendapatan terisi.
 - Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, belum tercapai (belum mencapai target) atau dengan presentase mencapai sebesar 75,55% (tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.399.310.204.482,00 terealisasikan Rp. 301.675.108.668,70

- Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk bentuk:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai ;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
 - d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
 - e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
 - Belanja operasi masih sangat tinggi 400% dibandingkan dengan belanja modal dan Sebaiknya belanja modal mendatang dapat ditingkatkan agar asset tetap yang dimiliki
 - Perumda Jasa Yasa mempunyai 8 (delapan) Unit Usaha yang sebagian besar atau 75% bergerak bergerak di Bidang Pariwisata.
 - Perumda Jasa Yasa di tahun 2022 mencanangkan sebagai tahun pemulihan pasca pandemic dan menjadi tahun investasi, sehingga akan banyak upaya menarik investor ke Perumda Perumda Jasa Yasa untuk bekerja sama di dalam Revitalisasi infrastruktur lokasi wisata dan penambahan wahana .
 - Sampai akhir akhir 2022 belum ada hasil bagian laba yang dibagikan ke pemerintah atas penyertaan penyertaan modal pada BUMD Jasa Yasa.
- Koperasi dan UMKM
- IKU yang ditetapkan dapat dicapai semua dengan dengan capaian di atas 100%.
 - Sejumlah 21 program selama tahun 2022 dan semuanya mencapai target 100%
 - Permasalahan yang di hadapi Koperasi dan UMKM
 - Kjusus pada Pengurus Koperasi masih di butuhkan transfer knowledge tentang perkoperasian.
 - Minim nya pengetahuan bisnis dan permodalan permodalan bagi UMKM.
 - Kurangnya promosi produk UMKM dan masih banyak menjual produk secara tradisional .
- Saran:
- Memberikan pelatihan tentang perkoperasian dan bisnis kepada pengurus koperasi.

- Memberikan penyuluhan tentang pengetahuan bisnis bagi pelaku UMKM Selain itu membantu mencarikan permodalan murah atau kerjasama kerjasama dengan pemilik modal.
 - Memberikan sosialisasi tentang digitalisasi pemasaran produk dan menyediakan wadah bagi UMKM untuk promosi melalui program pameran virtual
- Ketahanan Pangan dan Perkebunan
- Semua Program Target dan Realisasi 100% tetapi masih banyak masalah yang perlu dicari solusinya.
 - Ketahanan pangan Indikator kinerja utama tercukupi kebutuhan pangan utama (Beras) dan melebihi target
 - Dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat.
 - Kondisi pangan kala pandemi covid 19 di nyatakan prima, karena alami surplus 13.39 %
 - Untuk ketersediaan pangan terutama dari tanaman padi mengalami surplus 84.149 ton
 - Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 13.39 % dai bandingkan tahun sebelumnya.
 - Tanaman pangan dan Holtikultura
 - IKU dinas pertanian mencapai lebih dari 100 %,dengan indicator:
 - Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (100 %)
 - Persentase luas lahan padi sawah yang memiliki IP Padi sawah = 1.5(105 ,71 %)
- Badan Keuangan dan Asset Daerah
- Strategi yang dirumuskan sudah bagus dan dapat menyelesaikan sebagian permasalahan BMD yang dihadapi BKAD.
 - Aplikasi -E-BMD sebagai pengamanan Barang Milik Daerah, Hal ini dilakukan dengan cara pemberian stiker barcode seluruh Barang Milik Daerah Untuk sementara masih diterapkan pada internal BKAD

- Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Sumber Manusia BKAD melaksanakan dan mengirimkan ASN untuk Kegiatan Bimbingan Teknis
- Melakukan inventarisasi dan validasi Data Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Penghapusan serta serta pengamanan BMD dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah.

□ Saran :

- Pemberian stiker pada BMD bersamaan dengan kegiatan inventarisasi, sehingga kepemilikan atas BMD sudah jelas
- Peningkatan kapabilitas SDM (Bimtek) terkait BMD tidak hanya BKAD tetapi untuk semua pengurus BMD seluruh OPD, yang selama ini kurang mendapat perhatian .

□ Badan Pendapatan Daerah

- Strategi yang dilakukan Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

□ Saran :

- Pengamanan.
- Untuk meningkatkan PAD perlu lebih fokus dalam membangun sistem yg terintegrasi di semua OPD terkait.
- Masih rendahnya retribusi maka perlu menggali potensi kembali (riset) dan bagaimana dikelola secara profesional.
- Perlu menggali dan mengoptimalkan potensi sumber PAD karena realisasi PAD 2022 hanya 18 ,95 % dari total pendapatan
- Penerimaan pendapatan retribusi lebih di tingkatkan karena realisasi pendapatan retribusi masih jauh dari dari target yaitu 29 ,36 %.
- Sosialisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. Subjek pajak yang wajib dikenakan BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- Sesuai aturan, tarif pajak yang ditetapkan sebesar 5%.

- UU No .21 /1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan UU No .20 /2000, pemberian Hak Pengelolaan merupakan objek pajak
 - Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak Pengelolaan memperoleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya.
- Perindustrian dan perdagangan
- Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan
 - Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor
 - Urusan Pemerintahan bidang Perindustria
 - Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan
 - Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha industri
 - Beberapa masalah di dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Belum terpenuhinya standar produk industri untuk industri olahan makanan dan Minuman, berupa sertifikasi Halal dan Uji Mutu Produk
 - Belum terbukanya pasar secara regional, nasional dan internasional untuk untuk produksi industri unggulan
- Saran
- Memfasilitasi produsen untuk pengurusan sertifikat halal dan uji halal dan uji mutu produk agar produk terjamin dan pelanggan yakin kehalalan produk yang dibeli
 - Perlu tindakan nyata untuk mempromosikan produk lokal dengan mengikuti pameran virtual maupun konvensional baik tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
 - Menggali potensi PAD dari retribusi, mengoptimalkan dan menertibkan retribusi pelayanan pasar.

BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Rekomendasi / Catatan Strategis;

1. Mengharapkan agar Dinas PU Bina Marga mampu hadir memonitor, mendata serta menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait kondisi eksisting

infrastruktur baik jalan, drainase, jembatan untuk mewujudkan kondisi infrastruktur Kabupaten Malang yang baik dan merata

2. Perlunya penjadwalan pentahapan yang baik dalam proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan yang lebih mendetail dan terstruktur untuk menunjang pemaksimalan serapan anggaran

2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Perlu adanya perencanaan baik dalam hal waktu, biaya maupun kualitas yang lebih mendetail untuk menunjang pemaksimalan serapan anggaran
2. Menjaga agar penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dilakukan dengan baik serta menunjuk konsultan yang berkualitas/kredibel agar dapat merencanakan dan mengawasi pembangunan dengan selalu terjaga baik dalam segi waktu maupun kualitasnya.
3. Berdasarkan hasil pengawasan terkait pola pembangunan tenokratik perlu adanya sebuah kajian untuk menentukan apakah pola pembangunan multiyears ditetapkan dan ditargetkan selesai berapa tahun

3. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Terkait saluran irigasi kondisi baik selalu meningkat tiap tahun, namun di tahun 2022 menurun drastis disebabkan oleh bertambahnya saluran irigasi primer, oleh karena itu dimohon dinas terkait untuk mendata ulang terkait jaringan yang ada.
2. Terkait debit air irigasi pada area pertanian juga menurun drastis dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2022, dimohon dinas untuk turun ke lapangan serta memonitoring terkait kendala tersebut
3. Perlunya peningkatan dan menjaga intensitas koordinasi dengan Dinas Provinsi terkait untuk memelihara kelangsungan kefungsi aset-aset yang terkoordinasi dengan pemerintah propinsi Jawa Timur

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Bappeda agar selalu hadir dan mengawal tercapainya IKU maupun IKD yang merupakan indikator keberhasilan daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD

2. Perlunya Bappeda menyoroti terkait berbagai data yang tersaji dalam capaian kinerja yang tertuang dalam IKU dan IKD dengan faktual kondisi di masyarakat. Capaian IKU dan IKD yang tinggi diharapkan sejalan dan dapat dirasakan dalam realitas di masyarakat.
3. Untuk lebih dioptimalikan koordinasi dan pendekatan persuasif dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Malang agar merealisasikan CSR melalui kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang;
4. Perlunya menghadirkan sinergitas seluruh shareholder pemerintahan daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif & komprehensif.

5. Dinas Perhubungan

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Untuk lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan, agar merata pada semua kecamatan dan desa di Wilayah Kabupaten Malang khususnya yang menuju tempat-tempat pariwisata dan pendidikan untuk mengurangi angka kecelakaan;
2. Perlunya optimalisasi serta peningkatan terkait Pengelolaan Parkir di wilayah Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Perlunya Dinas Perhubungan untuk memahami serta mengadakan berbagai kegiatan yang diperlukan baik berupa kajian/penelitian maupun kegiatan lain untuk mendata, memetakan dan menghadirkan solusi terkait berbagai permasalahan kemacetan di Kabupaten Malang.

6. Dinas Lingkungan Hidup

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Perlu adanya upaya terkait peningkatan daya tampung TPS/TPST/TPA untuk menampung tonase sampah dari masyarakat setiap harinya. Mengingat bahwa kapasitas daya tampung sampah belum memenuhi tonase sampah yg dihasilkan masyarakat.
2. Pemerintah daerah harus lebih serius mewujudkan 3 strategi khususnya dilingkungan hidup terbukti permasalahan limbah B3 yang dihasilkan di puskesmas, poliklinik, rumah sakit dan Industri belum tertangani (masih dikelola di luar daerah/kerjasama), jika ini ditangani dengan serius tidak saja menyelesaikan problematik lingkungan, juga meningkatkan PAD yang tentunya berimbas pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Lebih ditingkatkan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat dalam perubahan perilaku yang bersifat *pro-environment* ;
4. Pengoptimalan pemantauan secara berkala mengenai kualitas udara dan air, konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

7. Dinas Komunikasi dan Informatika

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Perlu adanya perhatian terkait wilayah Blank spot di wilayah Kabupaten Malang; (baik internet maupun sinyal ponsel) untuk mewujudkan fasilitas informasi & komunikasi yang merata di Kabupaten Malang.
2. Belum Tercapainya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Malang secara menyeluruh, untuk mendorong setiap informasi di tingkat Kabupaten tersampaikan ke seluruh wilayah Kabupaten Malang.
3. Perlu upaya sosialisasi maupun kegiatan terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinternet/bermedia sosial agar menciptakan lingkungan dunia maya yang sehat dan tidak melanggar poin-poin yang tercantum dalam UU ITE di Kabupaten Malang.
4. Perlunya peningkatan terkait sistem kerja berbasis elektronik di wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang.

8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Mendorong setiap upaya Baliitbangda untuk mengadakan berbagai kegiatan baik berupa penelitian, kajian, sosialisasi, FGD, diseminasi, seminar untuk menyampaikan pemikiran/riset serta menampung berbagai masukan dari masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang partisipatif dan berkemajuan.
2. Perlu adanya berbagai kajian penting untuk menunjang kemajuan Kabupaten Malang. Termasuk didalamnya kajian terkait potensi pendapatan daerah, inovasi yang diperlukan daerah, hingga hal-hal teknis mencakup data kemacetan, sebeginupaya mewujudkan Kabupaten Malang yang maju dan makmur.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Meningkatkan berbagai upaya untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana di kabupaten Malang baik melalui kegiatan pelatihan/workshop maupun kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan
2. Perlunya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan Resiko Bencana ;
3. Perlunya menghadirkan data yang lengkap dan komprehensif terkait wilayah mitigasi daerah rawan bencana.
4. Mendorong terselesainya bantuan dari pemerintah pusat terkait dana bantuan kerusakan rumah yang terjadi akibat adanya gempa di Malang selatan.

Selain catatan strategis dan rekomendasi di atas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih :

1. Perlu adanya Koreksi dan evaluasi Tim LKPJ lebih teliti karena ada ketidak sesuaian data yang disampaikan Bupati dalam naskah pidato Bupati dengan dokumen LKPJ yang diserahkan kepada DPRD, mengingat dokumen LKPJ sangat penting dan tersampaikan pada publik.
2. Pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya mampu memberikan dampak pada peningkatan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, meningkatnya pendapatan perkapita dan mampu menekan gini ratio (tingkat kesenjangan pendapatan) serta dapat meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia.
3. Diperlukan adanya Kajian Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang dengan tujuan mengukur sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Malang dengan output berupa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang.
4. Mengingat beberapa OPD tidak punya wewenang melakukan Kajian terhadap program kegiatan yang prioritas, maka setiap OPD harus melakukan kajian program prioritas tersebut ke OPD terkait agar hasil efektif, efisien dan terukur.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. Bidang Pendidikan

Rekomendasi

- Banyak terdapat kekurangan tenaga pendidik ASN pada Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP) Negeri untuk sementara ini diatasi dengan pengajuan tenaga ASN

kepada Pemerintah Pusat melalui pengadaan PNS dan P3K dan upaya peningkatan kesejahteraan secara bertahap, selain itu Pemerintah Daerah harus selalu berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal pengangkatan PNS dan P3K tersebut lebih memprioritaskan tenaga honorer yang sudah ada, dari pada menambah tenaga baru dari masyarakat umum.

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan bezeteng
- Pemenuhan SPM bisa melalui BOSKAB untuk satuan pendidikan SD-SMP Negeri maupun swasta, anggaran tersebut diharapkan mendapat perhatian dalam APBD Kabupaten Malang pada tahun yang akan datang.

B. Bidang Kesehatan

Rekomendasi

- Penyediaan kapabilitas pelayanan dengan prioritas pertumbuhan dan pembelajaran fasilitas pelayanan kesehatan yang handal.
- Meningkatkan proses dan sistem layanan yang berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan.
- Membangun loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan yang Prima dan terjangkau
- Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang berkualitas memenuhi standar dan terakreditasi
- Menambah akses fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit Umum Daerah)
- Menambah akses fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Tingkat Pertama (Puskesmas)
- Penyediaan standar jumlah dan mutu Alat dan bahan untuk layanan SPM
- Penyediaan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang sesuai standar
- Peningkatan metode layanan yang inovatif dan proses layanan yang handal/prima
- Menyusun perencanaan konvergensi lintas pemangku kepentingan dalam upaya penurunan AKI dan AKB
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penurunan AKI dan AKB

- Menerapkan strategi inovasi layanan yang kreatif untuk menurunkan AKI dan AKB
- Meningkatkan upaya penekanan angka stunting dan gizi buruk dimana sesuai target Pemkab Kab. Malang di tahun 2024 dengan nol stunting
- Peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen penyelenggaraan operasional di Rumah Sakit yang profesional sesuai kebutuhan standart kompetensi jabatan dan standart pelayanan publik
- Perencanaan, penyiapan dan pengembangan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk memenuhi standart minimal penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan perorangan tingkat rujukan secara komperhensif, meningkatkan jejaring dengan puskesmas, bekerjasama dengan dengan asuransi non BPJS promosi digitalisasi pada masyarakat dengan memaksimalkan media sosial.

C. Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Rekomendasi

- Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi, sosialisasi terkait peningkatan keadilan gender, termasuk ketersediaan data anggaran responsif gender.
- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan hukum.
- Meningkatkan Penguatan kelembagaan, koordinasi, sosialisasi, terkait pemenuhan hak anak, termasuk pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi, sosialisasi dan jaringan penanganan kekerasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

D. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Rekomendasi

- Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada.

- Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud.
- Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah
- Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan.
- Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat.
- Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.
- Beberapa tantangan yang harus dihadapi karena Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas
- Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan

E. Bidang Tenaga Kerja

Rekomendasi

- Perlu adanya penyempurnaan indikator kinerja secara lebih rinci untuk mengetahui jumlah pengangguran, yang sudah mengikuti pelatihan serta yang sudah bekerja atau yang sudah usaha sehingga nanti bisa dirumuskan dalam berbagai indikator yang bisa diukur.
- Peningkatan penciptaan lapangan kerja di desa melalui program digitalisasi desa, baik terkait dengan BUMDES, Poktan, Gapoktan, seni dan budaya, wisata pertanian, dan lain-lain.
- Masih rendahnya dukungan anggaran yang bersumber dari APBD karena Sebagian anggaran bersumber dari APBN/DAK

F. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Rekomendasi

- Optimalisasi pada kualitas, kuantitas dan teknik promosi

- Optimalisasi hasil identifikasi pasar wisatawan
- Optimalisasi jejaring kepariwisataan dalam pengembangan kepariwisataan
- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam meningkatkan performa destinasi wisata
- Optimalisasi perbaikan sarana prasarana dan aksesibilitas penunjang kepariwisataan
- Optimalisasi peran serta seniman dan budayawan dalam pemajuan seni budaya daerah
- Optimalisasi pembinaan dan pengembangan seni budaya
- Optimalisasi perlindungan pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs dan permuseuman daerah

G. Bidang Sosial

Rekomendasi

- Perlu adanya konsistensi penggunaan indikator kinerja (input-proses-output-outcome)
- Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan masih lemahnya koordinasi serta meningkatnya peran individu keluarga, komunitas dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan social kepada PMKS.
- Perlu adanya penguatan database terhadap penerima bantuan karena masih di temukan data ganda bantuan masih tidak sesuai sasaran.

H. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rekomendasi

- Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan dan mitra kerja guna mendukung program Bangga Kencana
- Memperkuat sumberdaya manusia yang ada dilapangan dalam hal ini PPKBD dan sub PPKBD melalui kegiatan Capacity Building
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi program bangga kencana di masyarakat pada kelompok kegiatan
- Melakukan Inovasi-inovasi guna mempercepat pencapaian program
- Penyusunan ulang program Keluarga Berencana, untuk meningkatkan angka

keikutsertakan KB aktif, sehingga pertumbuhan angka kelahiran bisa dikendalikan

I. Bidang Perikanan

Rekomendasi

- Perlu pengembangan pakan ikan natif dengan sumber bahan pakan local.
- Dengan melakukan koordinasi ke BKPSDM terkait kebutuhan tenaga teknis di UPTD agar diusulkan melalui rekrutmen CPNS dan PPPK
- Perlu melakukan koordinasi ke BPP (Balai Pelatihan dan Penyuluh) Banyuwangi terkait kebutuhan penyuluh perikanan di Wilayah Kabupaten Malang
- Perlu penguatan kapasitas kelompok perikanan baik kelompok Pembudidaya (PODAKAN) Kelompok Nelayan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pengelola dan Pemasar (POKLASAR) dengan melaksanakan :
 - a. Bimbingan teknis perikanan tangkap dan pembudidaya
 - b. Penguatan kelembagaan kelompok
 - c. Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana
 - d. Fasilitas akses permodalan

J. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Rekomendasi

- Perlu adanya perhatian penuh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terhadap kelemahan masyarakat dalam menumbuhkan budaya literasi.
- Perlu adanya kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tebo dengan masyarakat atau perangkat desa yang dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya literasi masyarakat Kabupaten Malang
- Perlunya diadakan kegiatan-kegiatan lain yang edukatif dengan tema literasi dan bervariasi agar lebih menarik dimata masyarakat sambi mensosialisasikan budaya literasi

K. Bidang Peternakan

Rekomendasi

- Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan;
- Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan

- Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan.
- Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan.
- Pelayanan kesehatan hewan bagi ternak terus ditingkatkan melalui UPT Puskesmas serta masih perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan hewan di Kabupaten Malang.

L. Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Rekomendasi

- Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS)
- Perlu adanya penyajian pencapaian target indikator pada masing-masing program sehingga hasil kinerja pada setiap tahunnya akan bisa dievaluasi secara maksimal.
- Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan sesuai ajaran agama terhadap penyebaran aliran sesat dan adanya radikalsime perlu dilakukan sosialisasi dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat dan dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif

Catatan Strategis :

1. Pemerataan aksesibilitas dan kuantitas Pendidikan karena masih ada kesenjangan antar sekolah di desa dan kota
2. Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama terhadap penyebaran aliran sesat dan adanya radikalsime
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta pemerataan bawating karena masih adanya kepala sekolah yang merangkap lebih dari satu sekolah
4. Melakukan strategi kebijakan daerah untuk menanggulangi kekurangan tenaga pendidik pada satuan SD-SMP negeri, yang kekurangan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dan standar kualifikasi serta penempatan sesuai formasi dan tempat domisili,
5. Kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu dan di dukung Infrastruktur serta bangunan yang layak melalui DAK karena banyak

- bangunan sekolah yang rusak
6. Mengembangkan dan pembangunan Fasilitas kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah serta mendorong partisipasi masyarakat untuk mendirikan fasilitas kesehatan pada daerah yang sulit akses
 7. Identifikasi potensi dan pusat-pusat pemberdayaan generasi muda potensial hingga ke tingkat desa.
 8. Mendorong optimalisasi potensi daerah melalui pelibatan potensi masyarakat.
 9. Meningkatkan upaya penekatan angka stunting dan gizi buruk sesuai target Pemerintah kabupaten Malang di Tahun 2024 dengan Nol stunting
 10. Perlu mengeksplorasi dan mengedepankan ide-ide inovasi dalam pelayanan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.
 11. Selalu meningkatkan perlindungan perempuan dan anak terhadap Tindakan kekerasan yang masih terjadi serta di tambah adanya kasus viral anak pejabat.
 12. Meningkatkan peran individu, keluarga, komunitas dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan social kepada PMKS melalui peningkatan prosentase penerima bantuan tepat sasaran.
 13. Pemerataan infrastruktur untuk pemulihan pariwisata khususnya di daerah yang memiliki peninggalan sejarah ex Candi Srigading Kecamatan lawang
 14. Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga
 15. Masih rendahnya dukungan anggaran yang bersumber dari APBD karena Sebagian anggaran bersumber dari APBN/DAK untuk Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 16. Berharap ada langkah kongkrit terhadap ternak di UPT Wajak yang selama ini menjadi beban anggaran pakan ternak dan notabnya ternak tersebut tidak produktif

Saudara Bupati, Pimpinan dan Segenap Hadirin Sekalian Yang Berbahagia,

Secara umum LKPJ Bupati Malang tahun 2022 sudah cukup lengkap, rinci dan sistematis. Dokumen LKPJ telah menyajikan data dan informasi realisasi

capaian program kegiatan dan indikator kinerja, keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian Hasil Pembahasan DPRD terhadap Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2022, hal ini disampaikan dengan harapan semoga “**catatan strategis**” DPRD sebagai bahan evaluasi, rekomendasi dan rujukan Bupati Malang guna menetapkan program dan kebijakan di masa yang akan datang.

Sebelum mengakhiri laporan ini Kami menyampaikan **selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1444 H** bagi yang menjalankannya, semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini, dicatat sebagai amalan ibadah. Mohon maaf, apabila dalam pembahasan dan penyampaian laporan ini terdapat sikap dan tindakan kami yang kurang berkenan.

Akhirnya, kami selaku juru bicara DPRD menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua hadirin atas perhatian dan kesabarannya, serta apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, tutur kata dalam penyampaian, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya.

Sekian dan terima kasih,

Ihdinash Shirathal Mustaqim,

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Kepanjen, 17 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

Ketua,

Juru Bicara,

DARMADI, S.Sos

MAHRUS ALI

BAPAK/IBU HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PEMBACAAN LAPORAN DPRD ATAS HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2022, BESERTA **REKOMENDASI** DARI DPRD KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

KEPADA SAUDARA **MAHRUS ALI** SEBAGAI JURU BICARA DPRD DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA DARI PEMBACAAN LAPORAN DPRD TADI, TERDAPAT BEBERAPA REKOMENDASI SEBAGAI CATATAN STRATEGIS DARI :

1. BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN;
2. BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN;
3. BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR; DAN
4. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

CATATAN-CATATAN STRATEGIS DARI DPRD KABUPATEN MALANG TERSEBUT SEBAGAI BAHAN EVALUASI UNTUK DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG, DALAM RANGKA PERBAIKAN SERTA PENINGKATAN PELAYANAN MAUPUN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KE DEPAN.

SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

MEMASUKI ACARA TERAKHIR YAITU PENYAMPAIAN SAMBUTAN BUPATI MALANG ATAS REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MALANG TAHUN 2022. YANG AKAN DISAMPAIKAN OLEH BUPATI MALANG SEKALIGUS PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

UNTUK ITU, KEPADA **SAUDARA BUPATI** DIPERSILAHKAN.

.....Proses Pembacaan Sambutan Bupati atas Rekomendasi DPRD Kabupaten Malang, Yang Disampaikan oleh Saudara Bupati Malang dan penyerahan secara simbolis.....



Bismillahirrohmaanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang, Salam Sejahtera bagi kita semua.

- YTH.**
- SAUDARA WAKIL BUPATI MALANG;
 - SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;
 - PARA ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH ATAU YANG MEWAKILI;
 - SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA DAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
 - PARA WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali sambutan pada Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2022, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur

kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat wal'afiat dan dalam suasana penuh kebahagiaan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta para penerus perjuangannya hingga akhir masa.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Mewakili seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, Saya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Malang yang telah menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2022, dengan memberikan rekomendasi sebagai masukan penting dalam menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah pembangunan ke depan. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Panitia Khusus yang telah melaksanakan pendalaman terhadap LKPJ Bupati Malang Tahun 2022, dan menghasilkan catatan-catatan strategis serta rekomendasi positif terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan selama Tahun Anggaran 2022.

Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Tim LKPJ dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, atas kinerja dan kerja keras saudara-saudara sekalian bersama DPRD Kabupaten Malang di tahun 2022, mulai dari penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, yang dilanjutkan dengan pengendalian serta pengawasan, hingga penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 kepada DPRD Kabupaten Malang.

Dalam hal ini, patut menjadi kebanggaan bagi kita bersama, bahwa kerjasama serta sinergitas antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Malang pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Masing-masing pihak telah memiliki kesadaran yang tinggi tentang kewenangan, fungsi serta tugasnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Walaupun terkadang masih terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi fenomena pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sosial politik yang terjadi, namun perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan harus disikapi dengan sewajarnya pula, dengan mengedepankan toleransi, saling mengisi, serta saling

menghargai, sekaligus tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, maupun azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya mengenai rekomendasi yang disampaikan, baik yang bersifat administratif maupun substansi terhadap LKPJ Bupati Malang Tahun 2022, kami terima dan akan dipelajari dengan seksama untuk dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Dimana rekomendasi yang disampaikan DPRD ini merupakan sebuah saran yang sifatnya positif dan konstruktif dalam konteks perbaikan maupun penyempurnaan untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pada tahun 2022 lalu, *alhamdulillah* berbagai keberhasilan dan prestasi berhasil kita raih dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya pengakuan maupun penghargaan dari berbagai pihak yang diberikan kepada Kabupaten Malang. Namun kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang tentunya perlu untuk segera diperbaiki. Maka dari itu, mari kita perkuat sinergi dan komitmen bersama melalui peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan, dengan memperhatikan pula prinsip-prinsip partisipatif, dan kolaboratif, serta adaptif terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang.

Berbekal pengalaman di tahun sebelumnya, saat ini Pemerintah Kabupaten Malang tengah berpacu untuk mengakselerasi kinerja guna mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Harapannya roda pemerintahan dan pembangunan di tahun 2023 ini dapat berjalan lancar dan sukses tanpa hambatan berarti. Mudah-mudahan kesadaran dan kemauan, serta partisipasi aktif seluruh pihak juga semakin meningkat, untuk bersatu padu, berkolaborasi dalam mencurahkan segala kontribusi demi mewujudkan masa depan yaitu “Malang Makmur”.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangannya.

Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua, dan segenap Anggota DPRD, para aparatur pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang atas terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2022. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, dan petunjuk, serta mengiringi setiap derap langkah kita dalam mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 17 April 2023

BUPATI MALANG

Drs. H. M. SANUSI, M.M

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

TELAH KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN SAMBUTAN BUPATI MALANG ATAS REKOMENDASI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP LKPJ BUPATI MALANG TAHUN 2022.

KEPADA **SAUDARA BUPATI MALANG** DI SAMPAIKAN TERIMA KASIH.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

DENGAN DEMIKIAN, TELAH KITA IKUTI SELURUH RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, ATAS NAMA PIMPINAN DPRD MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PANITIA KHUSUS LKPJ BUPATI TAHUN 2021, JUGA KEPADA TIM LKPJ PEMERINTAH DAERAH BESERTA PERANGKAT DAERAH YANG TELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS PEMBAHASAN, SESUAI DENGAN WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN.

TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KAMI SAMPAIKAN JUGA KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG TELAH MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA. DAN APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN SELAMA PROSES PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MALANG TAHUN 2022, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DPRD, MOHON MA'AF YANG SEIKHLAS-IKHLASNYA DAN MUDAH - MUDAHAN APA YANG TELAH KITA HASILKAN INI MENDAPATKAN RIDHO DARI ALLAH SWT. SERTA BERMANFAAT BAGI BANGSA DAN NEGARA SERTA MASYARAKAT KABUPATEN MALANG KHUSUSNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR **"ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN"** RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG, SAYA NYATAKAN DITUTUP**TOK !!!!(3X)**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

**WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMIT THARIEQ WASSALAMU'ALAIKUM
WR. WB.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA**

DARMADI, S.Sos

